

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian diambil acuan dari penelitian terdahulu oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) yang meneliti bagaimana Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, menggunakan data panel tahun 2006-2011 dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan -0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,053. Variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Surya Ayomi (2014) yang meneliti bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama Terhadap Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan Sekitarnya Tahun 2003-2012, menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* dan *random effect*. Menyatakan bahwa terdapat hubungan berlawanan antara pertumbuhan sektor utama terhadap tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka di SWP Madiun dan sekitarnya. Sedangkan pengaruh pertumbuhan sektor utama menunjukkan

bahwa terdapat hubungan yang searah atau positif terhadap IPM di SWP Madiun dan sekitarnya.

Rini Sulistiawati (2012) yang meneliti bagaimana Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia, menggunakan regresi data panel tahun 2003-2012 dengan model *path analysis* menggunakan SPSS. Menyatakan bahwa upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Septian Jefri A, dkk. (2015) yang meneliti bagaimana Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus: Eks Karesidenan Besuki), menggunakan regresi data panel dan analisis lintas atau jalur dengan pendekatan *fixed effect* dan *random effect*. Menyatakan bahwa pengaruh PDRB dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variabel yang diteliti, objek, dan waktu penelitian. Penelitian sekarang menggunakan variabel PDRB sektor industri, penyerapan tenaga kerja sektor industri, upah minimum kabupaten dan indeks pembangunan manusia tahun 1999-2016. Serta penelitian sekarang menggunakan alat analisis *Error Correction Model*.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Industri dan Industrialisasi

Industrialisasi berasal dari kata industri, berdasarkan etimologi, kata “industri” berasal dari bahasa Inggris “*industry*” yang berasal dari bahasa Prancis kuno “*industrie*” yang berarti “aktivitas atau kerajinan”. Namun dengan perkembangan tata bahasa dan ilmu pengetahuan maka industri dapat didefinisikan secara spesifik lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk jasa industri.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) perusahaan atau industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. (Badan Pusat Statistik, 2017).

Arti industrialisasi secara umum merupakan proses perubahan struktur perekonomian, yaitu dari struktur pertanian menjadi struktur industri. Industrialisasi juga sering diartikan sebagai proses modernisasi ekonomi yang mencakup semua sektor ekonomi yang ada, terkait langsung maupun tidak langsung dengan industri manufaktur. Industri memang sangat perlu karena menjamin pertumbuhan ekonomi seperti penelitian empiris (*cross section study*) yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) tentang transformasi struktur ekonomi yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian atau sektor pertambangan menuju sektor industri.

Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi inovasi, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antara negara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan profit per kapita mendorong struktur ekonomi (Tambunan, 2001:78).

Ketika suatu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sector* maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami Industrialisasi. Industrialisasi dapat dilihat melalui sebuah proses transformasi struktural perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam

permintaan konsumen, produk domestik bruto, ekspor dan kesempatan kerja (Chenery dalam Tambunan, 2001:16).

2. Tujuan Dan Peran Industrialisasi Terhadap Perekonomian

Agar negara berkembang dapat melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan yang dihadapi, perlulah dilaksanakan program pembangunan seimbang, yaitu dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan penanaman modal diberbagai industri yang mempunyai keterkaitan. Dengan cara ini luas pasar akan dapat diperbesar, karena kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat keterkaitan. Dengan cara ini luas pasar akan dapat diperbesar, karena kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat yang diperoleh berbagai industri akan menciptakan permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai industri yang dibangun. Pembangunan industri menciptakan pasar bagi industri lain dan makin banyak industri yang dibangun, makin luas pasar dan memungkinkannya untuk menggunakan modal dengan lebih efisien dan intensif. Dengan demikian, pembangunan seimbang akan menjadi perangsang untuk memperluas permintaan terhadap modal dan menciptakan perangsang untuk mengadakan lebih banyak penanaman modal (Sukirno, 2006:276).

Sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat

dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional:

1. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
2. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
3. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
4. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
6. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3. Industri dan Macam-macamnya

Untuk mengetahui macam-macam industri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:

a. Pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP), industri nasional Indonesia di kelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu:

1. Industri besar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLB) dan kelompok kimia dasar (IKD) antara lain: industri pengolahan kayu dan karet alam, industri semen, industri batu bara dsb.
2. Industri kecil meliputi: industri pangan (makanan, minuman, dan tembakau). Industri sedang (tekstil, pakaian jadi serta barang-barang dari kulit). Industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan dan lain-lain). Industri galian bukan logam dan industri logam dsb.
3. Industri hilir yaitu kelompok aneka industri yang meliputi industri yang mengelola sumber daya hutan, industri yang mengelola dari hasil pertambangan, dan industri yang mengelola sumber daya pertanian secara luas dan sebagainya.

b. Mengelompokkan industri menurut tenaga kerja yang dipekerjakan menurut Badan Pusat Statistic (BPS) pengelompokan industri dengan cara ini dibedakan menjadi empat antara lain:

1. Perusahaan atau industri besar jika memperkerjakan 100 orang atau lebih.
2. Perusahaan atau industri besar jika memperkerjakan 20 orang sampai 99 orang.
3. Perusahaan atau industri besar jika memperkerjakan 5 orang sampai 19 orang.
4. Industri kemajuan rumah tangga jika memperkerjakan 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Industrialisasi di setiap negara mempunyai corak yang berbeda-beda, dalam implementasinya ada empat teori yang dilaksanakan oleh beberapa negara yang melandasi industrialisasi (Dumairy, 1996). Adapun ke empat teori tersebut adalah:

- a. Keunggulan Komparatif (*Comparative advantage*). Jenis industri yang dikembangkan oleh negara yang menganut teori ini industri yang merupakan keunggulan komparatif negara tersebut.
- b. Keterkaitan Industri (*Industrial Linkage*). Jenis industri yang dikembangkan oleh negara yang menganut teori ini adalah yang mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.
- c. Penciptaan Kesempatan Kerja (*Employment Creation*). Jenis industri yang dikembangkan oleh negara yang menganut teori ini adalah industri yang mempunyai penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
- d. Loncatan Teknologo (*Tecnology Jump*). Jenis industri yang dikembangkan oleh negara yang menganut teori ini adalah industri yang

mempunyai teknologi tinggi sehingga akan terjadi alih ekonomi bagi sektor-sektor lain.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang.

Menurut BPS (2016) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Untuk menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas dasar harga dasar atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) ditambah pajak atas produk neto (pajak kurang subsidi atas produk). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi

17 kategori lapangan usaha yaitu: (A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri Pengolahan, (D) Pengadaan Listrik dan Gas, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (F) Konstruksi, (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan Pergudangan, (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (J) Informasi dan Komunikasi, (K) Jasa Keuangan dan Asuransi, (L) Real Estat, (M,N) Jasa Perusahaan, (O) Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (P) Jasa Pendidikan, (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (R,S,T,U) Jasa lainnya. Setiap kategori tersebut dirinci lagi menjadi subkategori.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB merupakan penjumlahan kompensasi pekerja, surplus usaha bruto, pendapatan campuran bruto, dan pajak kurang subsidi atas produksi dan impor.

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga/LNPRT, (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (5) Perubahan Inventori, dan (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar.

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

5. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- a. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu

wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

- d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PNRB per satu orang penduduk.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

6. Penyerapan Tenaga Kerja

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja berarti pula timbulnya masalah kesempatan kerja, karena kesempatan kerja yang ada penting menyangkut berbagai aspek baik ekonomi maupun non ekonomi, disamping itu usaha perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu usaha meningkatkan taraf hidup. Kesenjangan yang terjadi diantara pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia berdampak makin terasa mendesaknya keputusan perluasan kesempatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Adapun yang dimaksud lapangan kerja adalah bidang kegiatan dari usaha atau pekerja atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Menurut Todaro (2003:404), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi yang

menghasilkan barang dan jasa atau suatu kondisi ketersedianya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Bertitik tolak dari kebijaksanaan tersebut maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Departemen Tenaga Kerja memandang perlu untuk menyusun program yang mampu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

7. Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah keseluruhan aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha, pencari kerja, serta perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Proses memepertemukan pencari kerja ternyata memerlukan waktu lama. Dalam proses ini, baik pencari kerja maupun pengusaha diharapkan pada suatu kenyataan sebagai berikut (Payaman J. Simanjuntak, 2001:91):

- a. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang berbeda.

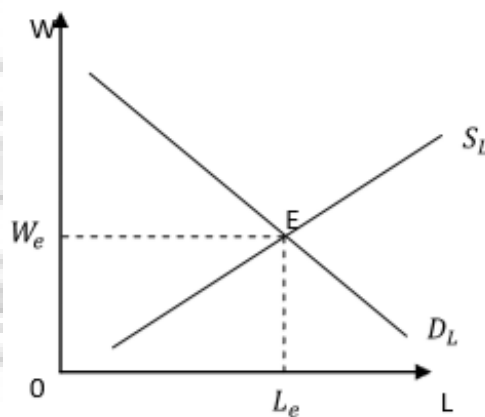
- b. Setiap perusahaan menghadapi lingkungan yang berbeda: Iuran (output), masukan (input), manajemen, teknologi, pasar, dll, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memberikan tingkat upah, jaminan sosial dan lingkungan pekerjaan.
- c. Baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai informasi yang terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan dalam butir (1) dan (2).

8. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan factor faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil output. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin kecil permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Apabila dikaitkan dengan upah tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya, apabila penghasilan tenaga kerja relative sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja (Sumarsono, 2009:89).

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dalam masyarakat. Besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Apabila tingkat upah naik maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah meningkat maka permintaan tenaga kerja akan menurun (Payaman J. Simanjuntak, 2001:89).



Sumber: Mankiw, 2004

Gambar 2.1. Keseimbangan Tenaga Kerja

Keterangan:

S_L : Penawaran Tenaga Kerja (Supply of Labor)

D_L : Permintaan Tenaga Kerja (Demand of Labor)

W : Upah

L : Jumlah Tenaga Kerja

W_e : Upah Keseimbangan

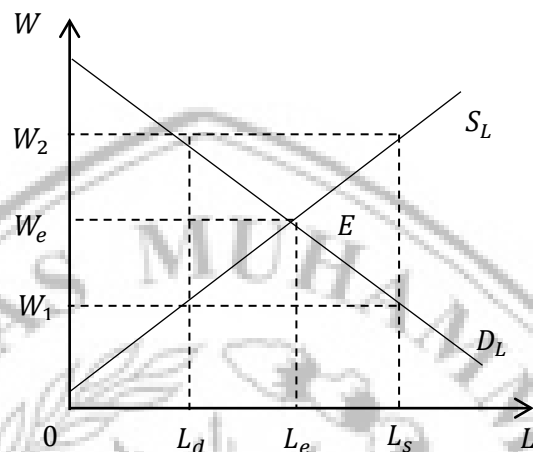
L : Jumlah Tenaga Kerja Keseimbangan

L_e : Keseimbangan Permintaan dan Penawaran

Berdasarkan gambar 2.1 menunjukkan pasar tenaga kerja, yang sebagaimana pasar lainnya, tunduk pada kekuatan permintaan dan penawaran. Para pekerja yang menentukan penawaran tenaga kerja, dan sebaliknya perusahaanlah yang menentukan jumlah permintaannya. Jika pemerintah tidak campur tangan, maka upah biasanya akan menyesuaikan hingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan gambar 2.2 dimana titik W_e melambangkan tingkat upah ekuilibrium (*equilibrium wage rate*), pada tingkat upah yang lebih tinggi seperti pada W_2 , penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni W_e . Sebaliknya pada upah yang lebih rendah seperti W_1 , jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh produsen akan

melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan diantara para pengusaha dalam memperebutkan tenaga kerja dan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekulibrium W_e .



Sumber: Todaro, 2000

Gambar 2.2. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Pendekatan Pasar Bebas

Dalam kenyataan titik ekulibrium itu tidak pernah tercapai karena informasi tidak pernah sempurna dan hambatan-hambatan institusional selalu ada. Upah yang berlaku (W) pada umumnya lebih besar dari pada upah ekulibrium (W_e). Pada tingkat upah W_2 , jumlah penawaran tenaga kerja adalah L_s sedang permintaan hanya sebesar L_d . Selisih antara L_s dan L_d merupakan jumlah penganggur.

9. Upah

Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap paling penting, sebab melalui jasa tenaga kerja inilah sumber daya alam dapat berubah menjadi hasil produksi yang bernilai. Untuk itu, atas pengorbanan dan kerjanya tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari majikan atau perusahaannya berupa penghasilan dalam bentuk upah.

Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Sementara Sukirno (2005:350) mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sedangkan T. Gilarso (2003:211) memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan lain-lain.

Secara lebih jelas pengertian tentang upah dipaparkan dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung pada:

- a. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;
- b. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja;
- c. Produktivitas marginal tenaga kerja;
- d. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha; dan
- e. Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:

- a. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;
- b. Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2005:151).

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Sumarsono (2009:151), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:

- a. menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;
- b. mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;
- c. menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.

Selanjutnya Sumarsono (2009:201) menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.

Payaman Simanjuntak (1993:19) menyatakan bahwa upah minimum dapat dilihat dari dua sisi:

- a. Pertama, sebagai alat perlindungan bagi pekerja agar nilai upah yang diterima tidak merosot karena pekerja memerlukan tingkat pendapatan tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.
- b. Kedua, sebagai alat perlindungan bagi pengusaha dalam arti perusahaan dapat berhasil apabila didukung oleh pekerja yang produktif, salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja adalah adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan pekerja.



Menurut Bentham (1948) dalam Pressman (2002:37), pemerintah memiliki tanggung jawab dan menjadi mekanisme untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warganya antara lain melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Marshall (1923) dalam Pressman (2002:92) juga melihat ekonomi dari pertimbangan moral untuk membantu yang miskin, selain pertimbangan pasar, karena itu ia secara khusus memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui pasar tenaga kerja. Menurut Marshall, persediaan tenaga kerja yang tidak terlatih ditentukan oleh *prinsip populasi Malthusian*. Sebagai reaksi terhadap upah yang tinggi, populasi akan meningkat dan persediaan tenaga kerja juga akan meningkat.

10. Upah Minimum

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (upah) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara upah yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh. Sementara di sisi lain, rendahnya upah buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak investor/kapitalis, dibanding dengan buruh.

Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan

yang melindungi pekerja/buruh ini sebagaimana termaktub dalam pasal 88 undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena halangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Sedang upah pokok minimum adalah upah pokok yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral. Dalam peraturan pemerintah, yang diatur hanyalah upah pokoknya saja tidak termasuk tunjangan.

Selanjutnya pada Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

- a. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 1. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 2. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- c. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- d. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Mengacu pada indeks konsumen yang berhubungan dengan inflasi, pemerintah senantiasa mengevaluasi tingkat upah minimum yang biasanya dilakukan setiap tahun. Dengan demikian, walaupun setiap tahun juga terjadi inflasi, diharapkan tetap terjadi peningkatan taraf hidup pekerja karena peningkatan upah diupayakan di atas tingkat inflasi yang ada.

11. Penetapan Upah Minimum

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada

standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai *”Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap...”*. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral.

Penetapan Upah Minimum Propinsi dilakukan oleh Gubernur dengan berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapan upah minimum sebagaimana di atas Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;
- b. Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
- c. Pertumbuhan ekonomi, yang merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
- d. Kondisi pasar kerja, yang merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;

- e. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu.

Kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1(satu) bulan. KHL terdiri dari komponen dan jenis kebutuhan pokok hidup yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menakertrans RI Nomor 13 Tahun 2012 yang terdiri dari 60 komponen, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

12. Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan

yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:35), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan

berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Gregory dan Stuart (1992:31) mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu umumnya membawa perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah yang sama. Pertimbangan menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena data tersebut umumnya mudah diperoleh di kantor-kantor statistik. Sebaliknya, data indikator kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang lebih kompleks, seperti presentase penduduk yang memiliki rumah, menikmati fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pemilikan alat hiburan seperti televisi dan radio, jarang tersedia (Sukirno, 2001:314).

Meskipun demikian, pengukuran kesejahteraan masyarakat yang hanya menggunakan pendapatan per kapita banyak ditentang oleh berbagai pihak. Hal ini terjadi karena kesejahteraan sifatnya normatif sehingga diperlukan pengukuran yang lebih komprehensif yang dapat menggambarkan kemajuan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya Todaro (2006:215) mengatakan bahwa angka kenaikan GNP per kapita mengandung kelemahan yang sangat fatal, yakni menyamarkan kenyataan fundamental yang sebenarnya, yaitu sama sekali belum membaiknya kondisi kesejahteraan kelompok penduduk yang relatif paling miskin. Pengalaman pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an,

ketika banyak di antara negara-negara Dunia Ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama itu.

Bahkan Bank Dunia sendiri, yang selama dekade 1980-an begitu mengagung-agungkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi, telah menyadari kekeliruannya dan bergabung dengan para pengamat dalam mengambil perspektif yang lebih luas mengenai tujuan dan makna dasar pembangunan. Dalam salah satu publikasi resminya, yakni *World Development Report*, yang terbit pada tahun 1991, Bank Dunia melontarkan pernyataan tegas bahwasannya: “Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di negara-negara yang paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya” (Todaro, 2006:22).

13. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial cukup beragam. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

14. Indeks Pembangunan Manusia

UNDP (1990), mengartikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat, seperti pilihan untuk sehat, berpendidikan, dan kehidupan yang layak. Pembangunan manusia sebagai proses partisipatif dan dinamis. Pembangunan manusia merupakan konsep yang sempurna dengan deskripsi pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan,

kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang adadan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Dimana:

X_1 = Indeks harapan hidup

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks standar hidup layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100 (BPS, 2010).

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- b. Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 80,0
- c. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 - 65,9
- d. Rendah : IPM kurang dari 50,0

C. Hubungan Antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

1. Hubungan PDRB terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan

telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya.

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

2. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja berarti pula timbulnya masalah kesempatan kerja, karena kesempatan kerja yang ada penting menyangkut berbagai aspek baik ekonomi maupun non ekonomi, disamping itu usaha perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu usaha meningkatkan taraf hidup. Kesenjangan yang terjadi diantara

pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia berdampak makin terasa mendesaknya keputusan perluasan kesempatan kerja.

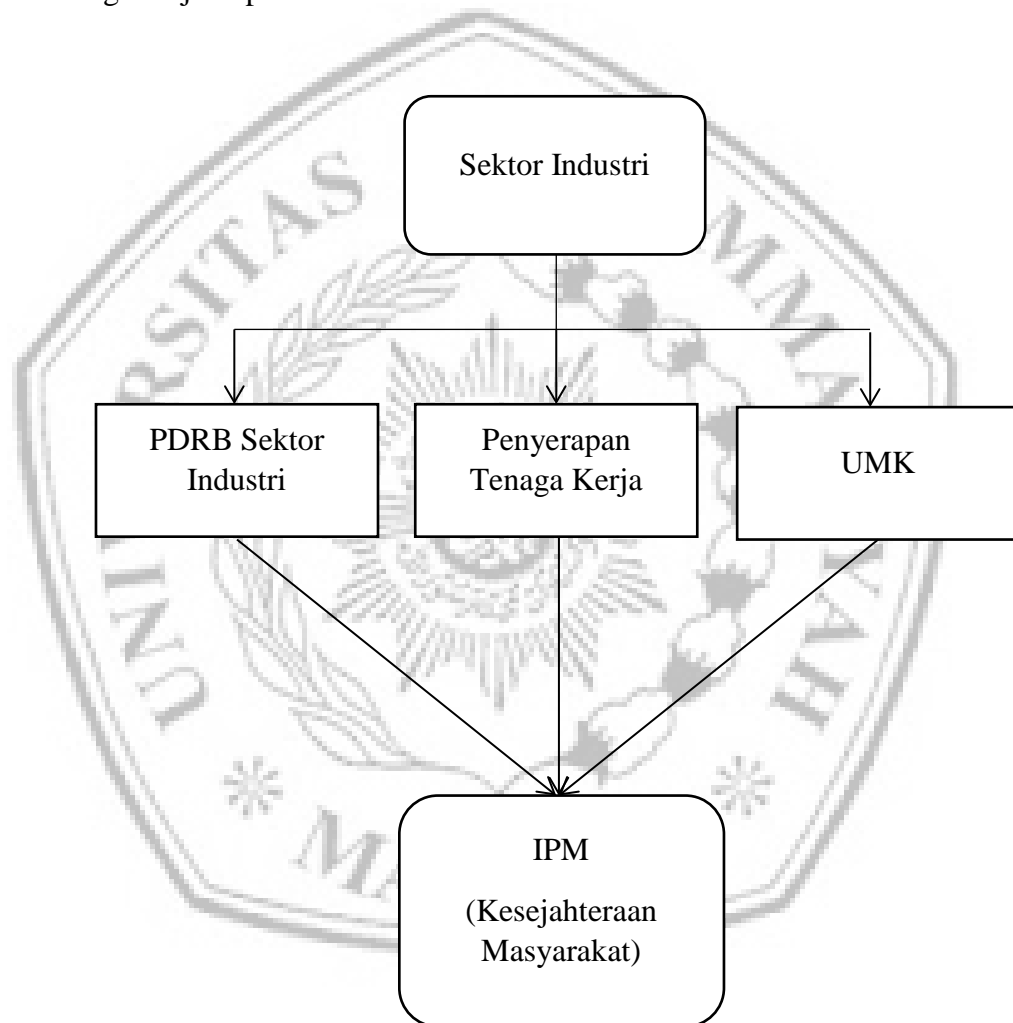
Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Irawan dan Suparmoko, 2002:88).

3. Hubungan UMK terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Upah merupakan wujud nyata dari sebuah bentuk pertukaran yang terjadi antara pengguna jasa (perusahaan) dan pemberi jasa (rumah tangga). Upaya meminimalisasi persoalan upah minimum yang dilakukan pemerintah dengan menyusun upah minimum yang diharapkan menjadi acuan bagi pengusaha agar memenuhi kewajibannya membayar upah buruh atau pekerja untuk dapat hidup layak dari upah yang diterimanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka keputusan UMK untuk tiap Kabupaten atau Kota Madya langsung dibuat oleh Gubernur atas rekomendasi para Bupati dan Walikota yang berada di propinsi masing-masing.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari landasan teori yang digunakan dalam menganalisis masalah yang diteliti. Pendekatan yang dibutuhkan untuk melihat data empiris dengan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

E. Hipotesis

Hipotesis adalah praduga atau dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dibuat hipotesis berikut:

Diduga PDRB sektor industri, penyerapan tenaga kerja, upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan.

